

**PERAN KADER MUHAMMADIYAH DALAM PARTISIPASI
PILKADA SERENTAK KOTA BAU-BAU**

Feramita Hasani Bobby¹, Junaid Gazalin²
feramita11@gmail.com¹, junaidgazalin@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Buton

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi dikalangan Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah guna menjadikan tujuan Pemilihan Kepala Daerah yang kooperatif dan demokratis terlaksana. Tujuan dalam penulisan ini adalah tentang mengetahui langkah-langkah yang diambil beberapa tokoh agama khususnya kader Muhammadiyah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, demokratis dan aman. Pendekatan atau metode yang dipakai dalam penelitian yang penulis gunakan adalah (library research) dalam teknis deskriptif kualitatif eksploratif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan kajian pustaka. Hasil peneitian ini adalah peran kader Muhammadiyah yang tidak mengikuti politik praktis dan juga tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Akan tetapi ikut andil dalam melaksanakan demokrasi yang aman dan terciptanya politik substansial yang berfokus pada hasil dari pemilihan kepada daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Peran, Kader, Muhammadiyah, Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana perwujudan demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menurut Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi bahwa demokrasi sebagai sistem politik, dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik (Huda dan Nasef, 2017).

Pentingnya dilaksanakan Pemilihan Umum pada dasarnya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara, dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan (*consent*) dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya (Pardede, 2014).

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau dari calon perorangan dengan persyaratan tertentu. Pilihan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah semestinya dipilih dengan tepat agar dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu dan memiliki visi misi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah (Wahyu Widodo, 2015). Berdasarkan pendapat tersebut, maka hakikatnya PILKADA merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah.

Pada tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disebut juga PILKADA. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan atau pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Herry Febriadi, 2018).

Partisipasi dan peran tokoh agama juga diperlukan dalam politik. Peran disebut juga sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang atau sekumpulan orang terhadap orang lain berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem dimana tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial. Peran juga dideskripsikan sebagai sebuah makna yang dikaitkan dengan orang lain atau pada suatu komunitas sosial dan politik tertentu sehubungan dengan kombinasi antara posisi dan pengaruh. Peran juga diartikan sebagai perilaku yang meliputi tiga hal yakni perilaku seseorang berdasarkan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat dimana terdapat beberapa peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal lainnya yang dikaitkan dengan peran ialah suatu konsep mengenai apa yang akan dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat sebagai sebuah organisasi serta perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pentingnya peran beberapa tokoh menjadi salah satu alasan kader Muhammadiyah disebut mampu memberikan perubahan dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Salah satu contohnya adalah pemilihan kepala daerah yang terjadi di D.I Yogyakarta pada tahun 2017, diketahui melibatkan peran dari organisasi masyarakat yang berbasis agama Islam yakni Muhammadiyah. Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah

merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia yang memiliki gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berazaskan Islam serta bersumber pada Al-Qur'an dan Assunnah. Meskipun pada era reformasi, Muhammadiyah tidak berpartisipasi pada partai politik manapun, namun menjelang kontestasi pemilu baik itu pemilu legislatif yakni pemilihan umum presiden, maupun pemilihan kepala daerah, Muhammadiyah tetap mendukung politik kebangsaan yang mengutamakan pendidikan politik berbasis moral. Selaku ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menegaskan bahwa kadernya harus pandai dalam menempatkan diri sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan yang tidak terlibat dalam politik praktis (Haedar Nasir, 2010).

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah sering menghadapi perubahan zaman baik itu bersifat sosial maupun perubahan yang terjadi di masyarakat bawah dan perubahan budaya. Dalam hal politik, Muhammadiyah mempunyai dinamika yang unik sesuai dengan kebutuhannya. Muhammadiyah mempunyai pokok-pokok pemikiran dan gagasan sendiri terkait perpolitikan terhadap bangsa dan negara dimana pemikiran kebangsaan ini mengatri sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap perkembangan dan dinamika perpolitikan di Indonesia. Perubahan sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap perpolitikan Indonesia diatur melalui pokok pemikiran yang bersifat strategis berupa khittah. Khittah Muhammadiyah mengatur bagaimana cara pandang Muhammadiyah dalam berbagai sifat strategis termasuk politik dari tahun ke tahun sejak berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki perbedaan pandang terkait dengan ketertiban Muhammadiyah terhadap politik di Indonesia. Pemikiran politik kebangsaan dari organisasi Muhammadiyah akan terus berubah sesuai dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Namun, belum mendasar dan hanya bersifat memperbaiki sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga Muhammadiyah terlibat aktif terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang salah satunya adalah pembangunan masyarakat melalui keterlibatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan beberapa uraian diatas terkait semangat PILKADA yang memberikan pendidikan politik bagi rakyat local serta sebagai mekanisme menghasilkan tatanan pemerintahan lokal yang baik (lokal good governance), idealnya dijadikan patokan bagi penyelenggara pemilu, kandidat, masyarakat, partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja dan mengawal substansi tersebut. Sebagaimana hal itu, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah tentang mengetahui langkah-langkah yang diambil beberapa tokoh agama khususnya kader Muhammadiyah dalam melaksanakan PILKADA yang berkualitas, demokratis dan aman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka. Kajian kepustakaan bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah diketahui tentang suatu topik atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan suatu masalah yang sedang diteliti. Metode kualitatif yang berbasis studi kepustakaan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian. Peneliti dapat menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari literatur-literatur yang sudah ada dan kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data tersebut. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang suatu masalah dan menemukan jawaban atau solusi untuk masalah yang sedang diteliti (El Shidqi & Gunanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan dan uraian terkait pandangan Muhammadiyah terhadap politik Indonesia yang mulai berubah, membuat beberapa tokoh Muhammadiyah tidak terlibat lebih jauh ke dalam politik Indonesia saat ini. Gerakan Muhammadiyah dikenal dengan gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan ijtihad yang tentu berbeda dengan

pandangan politik Indonesia. Akan tetapi hal ini, tidak menjadi penghalang bagi kader Muhammadiyah untuk ikut melaksanakan tugas sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah.

Ijtihad Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan gerakan permunian ajaran islam (tajridu al Islamiyah), di sisi lain juga merupakan gerakan pembaharuan peradaban (tajridu al Hadharah). Ijtihad Muhammadiyah, didalamnya dituntut untuk selalu mampu membuat langkah-langkah yang kreatif, inovatif, dan responsive terhadap perkembangan zaman, begitu pula di bidang politik. Hingga saat ini ijtihad politik Muhammadiyah bisa dibidang lebih berfokus pada upaya menjaga jati diri Muhammadiyah, sekaligus cerminan dari kurang berhasilnya ijtihad dalam politik. Muhammadiyah menyatakan diri untuk tidak lagi terlibat pada politik praktis. Dibalik itu, Muhammadiyah menyadari bahwa politik menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka gerak dan langkahnya tidak akan bisa lepas dari kehidupan politik.

Sejak awal didirikan, Muhammadiyah memandang kehidupan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, walau Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam politik praktis secara langsung, kiprah politik Muhammadiyah tetap dilakukan dalam bentuk yang lain. Partisipasi Muhammadiyah dalam menyumbangkan pemikiran yang dibutuhkan bangsa dan negara tanpa mengabaikan aksi gerakannya yang bersifat konkret.

Muhammadiyah bertijihad melalui Khittah, bahwa gerakan Islam ini mengambil bagian dalam perjuangan politik secara umum, yakni membangun masyarakat dan peduli terhadap kebijakan-kebijakan strategis negara. Demikian peran politik kebangsaan yang diasung Muhammadiyah dengan sebutan politik adihulung atau high-politics. Peran politik kebangsaan ini menyatu dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Namun, berdasarkan Khittah pula, Muhammadiyah bertijihad tidak mengambil peran dalam perjuangan politik praktis, yakni politik untuk meraih kedudukan dalam pemerintahan.

Penelitian terhadap

Beberapa penelitian yang mengkaji terkait peran Muhammadiyah dalam berpolitik di berbagai daerah yang menjadi pandangan bagaimana peran kader Muhammadiyah dalam menyikapi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang akan dilaksanakan di Kota Bau-Bau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Nurjaman (2015) dengan judul penelitian "Cleavage Agama Di Tingkat Lokal Indonesia: Identifikasi Partai Tanpa Komitmen Electoral Tahun 2015", dimana hasil penelitian ini menyebutkan bahwa peran Muhammadiyah dalam partai politik yakni PKB dan PAN adalah bersifat netral serta tidak memihak di antara keduanya karena berdasarkan pada prinsip Muhammadiyah yakni sebagai kelompok Islam yang menjunjung tinggi kebebasan warganya untuk memilih para calon bakal kepala daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jusuf Harsono (2015) dengan judul penelitian "Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015", dimana hasil penelitian ini adalah sikap politik sebagai peran dari organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA dalam pemilihan bupati Ponorogo tahun 2015 yakni tidak melakukan politik praktis atau mendukung salah satu calon secara formal dan organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai fasilitator yang bersifat informal tentang PEMILUKADA. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik

- seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2015) dengan judul “Peran Elit Muhammadiyah D.I Yograkarta Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah 2014 – 2019”, dimana hasil penelitian ini adalah elit Muhammadiyah memiliki peran dalam fungsi struktur sosial sebagai agen sosialisibakal calon yaitu, kiai, pengurus wilayah hingga pengurus ranting dan simpatisan sehingga mereka memiliki fungsi yang besar demi mengembangkan kualitas masyarakat disekitarnya dalam pemilihan legislative DPD D.I Yograkarta dengan tujuan untuk meraih suara yang cukup untuk kembali mewakili Yogyakarta di Senayan.
 4. Penelitian yang dilakukan oleh MA. Sumadji (2016) dengan judul “Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Di Surakarta Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung (Sebuah Studi Komparatif)”, dimana hasil penelitian ini adalah peran politik para elit Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terbagi menjadi tiga varian yakni sikap moderat idealistic yang orientasi sikapnya menuju pada Islam ideal sesuai dengan Al-Qur’an dan As-sunnah. Sikap realistic-kritis yang melihat ketertarikan antara dimensi substansif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. Sikap akomodatif-pragmatis yang meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromitis ddengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan. Perbedaan dan persamaan sikap para elit diidentifikasi secara komparatif sehingga jelas elit yang setuju dan tidak setuju terhadap pemilihan Presiden secara langsung.
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Aryudhi, Eky Prasetya (2018) dengan judul “Menguji Netralitas Politik Muhammadiyah Pada PolitikLokal”, dimana hasil penelitian berdasarkan sikap netralitas pertama, sikap secara tidak aktif mendukung salah satu kandidat. Kedua, tidak menjadi tim sukses salah satu calon. Ketiga, tidak memiliki kepentingan politik. Dari ketiga aspek tersebut, PDM Kota Yogyakarta tidak netral, karena tidak memenuhi indicator ketiga aspek tersebut. ketidaknetralan PDM disini bukan berdasarkan bahwa PDM berafiliasi dengan partai politik, atau berperilaku seperti partai plitik untuk memenangkan calon di pilkada kota Yogyakarta 2017. Akan tetapi, karena keterpihakan PDM mendukung salah satu calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Bau-Bau

Faktor pendukung Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasti yang banya menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada. Walaupun pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah, tidak akan membatalkan hasil Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan diri sebagai unsur sentral suatu daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak yang berlangsung pada tahun 2018 di Kota Bau-Bau, menunjukkan presentase tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,87% dan sisanya 30,31% adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut pasal 1 ayat 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyusunan daftar pemilih yang dimaksud dengan DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan(Faharudin, 2021). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah pemilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Data Pemilih Kota Bau-Bau Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Betoambari	5	52	6.369	6.681	13.050
2	Wolio	7	124	15.050	15.714	30.764
3	Sorawolio	4	22	2.585	2.731	5.316
4	Bungi	5	21	2.650	2.652	5.302
5	Kokalukuma	6	54	6.742	6.851	13.593
6	Murhum	5	52	6.637	6.988	13.625
7	Lea-Lea	5	24	2.734	2.746	5.480
8	Batupoaro	6	80	9.895	10.598	20.493
Total		43	429	52.662	54.961	107.623

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Tahun 2019

Pertumbuhan penduduk pada setiap wilayah menjadi salah satu faktor tingkat partisipasi pemilih bertambah. Jika pada penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa jumlah pemilih kota bau-bau pada tahun 2018 sebanyak 106.954 jiwa dan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 76.821 jiwa. Maka pada penelitian kali ini, ditemui bahwa jumlah pemilih di kota bau-bau pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan Keputusan Komisisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah pemilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Data Pemilih Kota Bau-Bau

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Betoambari	5	59	6.856	7.445	14.301
2	Wolio	7	121	14.467	15.286	29.753
3	Sorawolio	4	24	2.793	2.983	5.776
4	Bungi	5	25	3.006	3.070	6.076
5	Kokalukuma	6	59	6.719	7.102	13.821
6	Murhum	5	59	6.847	7.331	14.178
7	Lea-Lea	5	24	2.956	2.971	5.927
8	Batupoaro	6	78	8.851	9.752	18.603
Total		43	449	52.495	55.940	108.435

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2, menyebutkan bahwa jumlah pemilih Kota Bau-Bau pada tahun 2024 adalah sebanyak 108.435 jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 52.495 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 55.940 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 1 % dari jumlah partisipan atau pemilih untuk Kota Bau-Bau.

Pembahasan

Peran Muhammadiyah Pada Pilkada Kota Bau-Bau

Muhammadiyah memiliki beda pandangan terhadap politik, meski tidak berfaaliasi dengan salah satu partai politik, namun Muhammadiyah tidak anti politik. Politik juga dipandang sebagai media dakwah untuk kemajuan bersama. Maka kader Muhammadiyah harus berani mengambil peran dalam konsntrasi pemilu serentak 2024.

Menurut Drs. La Ihu, M.M. selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota BauBau, bagi Muhammadiyah ketika momentum tahun politik atau elektoral seperti hari-hari ini merupakan ajang silaturahmi, beradu gagasan, menyatukan perbedaan yang ada

serta memberikan kontribusi kebangsaan yang baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu juga di sisi lain Muhammadiyah memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia dengan memberikan edukasi politik pendidikan politik dan menjaga perpecahan belah terutama dengan masalah isu agama suku ras dan lain sebagainya. Muhammadiyah bersikukuh dengan tegas posisi pada pemilu mendatang secara organisasi bersikap independensi tidak berpihak pada salah satu pasangan calon mana pun. Harapannya Muhammadiyah terus memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Serta menjadi salah satu organisasi yang memberikan pesan kebangsaan edukasi politik kepada warga Muhammadiyah untuk memilih calon pemimpin dan wakil wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan (La Ihu, 2024).

Dalam jurnal lain Ketua (PWM) Jawa Tengah, Tafsir menyebutkan bahwa kader Muhammadiyah harus berani mengambil bagian dalam politik dan dilarang apatis. Sebab lancarnya dakwah ditopang oleh tiga unsur yakni kekuasaan, ekonomi dan busaya yang ketiganya berjalan seimbang. Meski begitu, dalam berpolitik kader Muhammadiyah tetap harus memprioritaskan moral dan mengutamakan realisasi visi misi dan program untuk kemaslahatan rakyat. Lebih lanjut, Tafsir juga menjelaskan bahwa dirinya yakin banyak kader Muhammadiyah yang memiliki kompetensi SDM untuk maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (Aan Ardianto, 2021).

Sebagai organisasi masyarakat yang besar dan mempunyai keluarga yang banyak tentu Muhammadiyah banyak didekati para bakal calon yang akan mengikuti kompetisi pada elektoral 2024. Berdasarkan pengalaman dan dinamika politik yang dirasakan selama ini pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya, Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Meskipun secara organisasi dalam khittah Muhammadiyah tidak berpolitik secara praktis tetapi secara personal individu. Muhammadiyah juga menyebutkan bahwa kader atau warga yang terlibat dalam ranah politik itu merupakan jalan dakwah Muhammadiyah dalam ranah siyasah atau mengambil bagian dari kekuasaan dan menentukan kebijakan publik.

Peran kader Muhammadiyah tentu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Muhammadiyah memberikan peran kebangsaan kepada masyarakat dan memberikan edukasi bahwa dengan momentum pemilu ini bukan ajak untuk saling menjatuhkan satu sama lain untuk saling berpecah belah bahkan sampai menimbulkan konflik. Selain itu, disisi lain Muhammadiyah memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia dengan memberikan edukasi politik pendidikan politik dan menjaga perpecahan terutama dengan masalah isu agama, suku, ras, dan hal lainnya (Muhammad Fakhrol Rodzi, 2023).

Demikian pula kader Muhammadiyah pada daerah, salah satunya Muhammadiyah Bau-Bau. Kadarsiman selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bau-Bau, dalam sambutannya pada Diskusi Pemilu dan Demokrasi dengan mengusung tema “Pemuda Dalam Menakar Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024” yang dilaksanakan di Kota Bau-Bau, menyebutkan bahwa dengan adanya diskusi ini bertujuan untuk memproyeksikan posisi dan peran kaum muda dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Para pemuda diharapkan untuk tidak menjadi penonton, namun mengambil peran dalam menjamin pemilu yang berintegritas sebagaimana ketentuan undang-undang. Selain itu, Yusdfitriadi juga menegaskan bahwa pemuda Muhammadiyah tidak semestinya terpengaruh dan terjebak pada persoalan-persoalan teknis dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Peran Muhammadiyah seharusnya menghadirkan dan mendorong terciptanya politik substansial, yakni bagaimana output atau hasil pada pemilu maupun pilkada tersebut mampu memberikan dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya (UM Buton, 2022).

Peran kader Muhammadiyah tidak dibatasi hanya sebagai partisipan dalam ajang pilkada, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Bau-

Bau. Pemuda Muhammadiyah juga perlu ikut andil dalam mensukseskan ajang demokrasi ini dengan aktif sebagai penyelenggara dengan partisipasi atau hal yang lainnya. Kesempatan yang diberikan kepada beberapa pemuda Muhammadiyah seperti yang terjadi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang diikut sertakan dalam ajang demokrasi ini sebagai interviewer pada pemilu 2024 menjadi peran kader Muhammadiyah yang diharapkan. Adanya kesempatan tersebut juga membuka peluang dakwah organisasi Muhammadiyah yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan salah satunya pendekatan politik tersebut (UM Buton, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu jumlah partisipan dalam pemilu tahun 2024 meningkat yang sebelumnya pada tahun 2018 jumlah pemilih sebanyak 106.954 jiwa, sedangkan pada tahun 2024 meningkat 1,37 %, yakni menjadi sebanyak 108.435 jiwa yang terbagi dari 8 Kecamatan/Desa. Adanya peningkatan tersebut menjadi peran masyarakat dalam menjadikan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis tanpa adanya keributan antar warga Kota Bau-Bau.

Temuan hasil penelitian berikutnya yaitu dibalik meningkatnya jumlah partisipasi tersebut menjadikan peran beberapa organisasi, tokoh adat, tokoh agama, menjadi hal penting dalam menetralkan situasi panas akibat pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijabarkan sebelumnya, bahwa peran elit Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia saat ini, sangat memberi pengaruh terhadap jalannya pemilihan baik itu pemilihan legislatif maupun pilkada. Peran Muhammadiyah dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan beberapa penelitian sebelumnya, yakni mengadakan disuksi atau sosialisai, kader Muhammadiyah juga tidak dianjurkan untuk menjalankan politik praktis, sebaiknya untuk dapat aktif dalam penyelenggaraan pemilihan. Hal serupa yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah Bau-Bau.

Pada hasil penelitian yang diperoleh, pemuda Muhammadiyah mengadakan diskusi yang bertujuan untuk mengajak kader Muhammadiyah agar dapat ikut berpartisipasi dalam menjalankan dan mensukseskan pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menjelaskan bahwa kader pemuda muhammadiyah sebaiknya ikut berpartisipasi dan tidak terlibat politik praktis serta tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan personal yang merusak kerukunan bermasyarakat, sebaliknya pemuda Muhammadiyah diharapkan mampu memberikan demokrasi yang aman dan terciptanya politik substansial yang fokus pada hasil dari pemilihan kepala daerah tersebut dalam memberikan kesejahteraan rakyat. Adanya partisipasi pemuda Muhammadiyah dalam demokrasi dengan terlibat sebagai interviewer pada pemilu 2024 menjadikan peran kader Muhammadiyah tidak hanya berfokus untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan sebagai partisipasi menggunakan hak pilih, akan tetapi juga mampu menjalankan tugas untuk suksesnya ajang demokrasi ini dari dalam lingkup politik itu sendiri.

KESIMPULAN

Peran kader Muhammadiyah dalam pemilihan kepala daerah sangat penting dalam hal meningkatkan suara bakal calon, saran dari tokoh agama seperti kiai, maupun peran pemuda Muhammadiyah dalam partisipasinya mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan mengadakan sosialisai dan terlibat dalam penyelenggaraan pilkada. Tidak menutup sampai disitu peran komisis pemiliha umum (KPU) juga menjadi yang sama pentingnya untuk menciptakan pilkada yang demokratis. Sebagai pelaksana pilkada, KPU Kota Bau-bau memiliki peran penting baik dalam urusan administrasi pencalonan sampai dengan meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan adanya peran aktif dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bau-Bau sebagai lembaga pemantau dalam mengawasi jalannya pilkada telah memberikan kesadaran kepada rakyat untuk

menyalurkan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Aan. (2022). Pemilu Serentak 2024, Wilayah Muhammadiyah Ini Dorong Kadernya Ambil Peran Politik. [Unggahan blog]. Diakses di <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/pemilu-serentak-2024-wilayah-muhammadiyah-ini-dorong-kadernya-ambil-peran-politik/>
- Aryudhi, Eky Prasetya. (2018). Menguji Netralitas Politik Muhammadiyah Pada Politik Lokal. Diakses di <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19952>
- El Shidqi, R. F., & Gunanto, D. (2023). Relasi Muhammadiyah dan Politik pada Pemilu 2019 Tentang Pemilihan DPR RI (Studi Khusus Kota Yogyakarta). *INDEPENDEN, Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 4 N0.2. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>
- Faharudin. (2021). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Serentak Tahun 2020. Universitas Islam Indragiri. <https://ejournal.unisi.ac.id>
- Febriadi, Herry. (2018). Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al'Adl, Volume X, No.1* [Unggahan Web]. diakses dari <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1152/972>
- Harsono, J., (2015). Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015. Vol. 6, No.1. Diakses di <http://doi.org/10.24269/ars.v6i1.780>
- Huda, N., & Nasef, I. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Kencana.
- Ilham, M., (2015). Peran Elit Muhammadiyah D.I Yograkarta Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah 2014 – 2019. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses di <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19012>
- KPU. (2023). Keputusan Komisisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- La Ihu. (2024). Peran Muhammadiyah dalam Pemilu Serentak Kota BauBau [Personal communication].
- Nasir, Haedar (2021). Memahami Ideologi Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nurjaman, A., (2015). Cleavage Agama Di Tingkat Lokal Indonesia: Identifikasi Partai Tanpa Komitmen Electoral Tahun 2015. *Sospol*, 3(2), 43 – 65. Diakses dari <http://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.5065>
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85. [Unggahan Web]. Diakses dari <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Rodzi, M. F., (2023). Pemilu 2024 dan Peran Muhammadiyah. [Unggahan web]. Diakses di <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/rodzi-bima/pemilu-2024-dan-peran-muhammadiyah-21aA7V7vEeo>
- Sumadji, M. A. (2016). Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Di Surakarta Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung (Sebuah Studi Komparatif). Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Kendari.
- UM Buton. (2022). Sambut Pemilu, Pemuda Muhammadiyah Kota Bau-Bau Adakan Diskusi. [Unggahan web]. Diakses di <https://ipv6.umbuton.ac.id/berita/>
- UM Buton. (2024). Empat Mahasiswa UM Buton Siap Bertugas Sebagai Interviewer Pada Pemilu 2024. [Unggahan web]. Diakses di <https://www.umbuton.ac.id/berita/>
- Widodo, Wahyu. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Civis* 5(1): 679–91 [Unggahan web]. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629>